

I'm not a bot



Suara.com - Belakangan ini surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan publik karena adanya usulan dari Forum Purnawirawan TNI. Kini, surat pemakzulan tersebut sudah berada di pembahasan rapat pimpinan DPR, yang dikonfirmasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai ini merupakan berita bagus karena jadi penilaian dalam proses penegakan keadilan serta proses demokrasi. Creative / Video Editor: Jasmine Putri / Rully Fauzi Jakarta, CNN Indonesia – Surat usulan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming masih menemui jalan buntu hampir sebulan sejak dilayangkan pada Selasa (3/6). Nasib surat itu kini akan kembali ditentukan jelang memasuki masa sidang DPR usai sebulan melewati masa reses lebaran Iduladha. Pasalnya, sejumlah pihak sebelumnya menilai DPR dan MPR perlu mengambil sikap resmi atas usulan para jenderal itu. Fraksi-fraksi di DPR harus menyatakan sikapnya di Paripurna untuk menentukan apakah usulan itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Maka, sebaiknya DPR maupun MPR harus menyikapi surat itu secara resmi," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun saat dihubungi, Jumat (20/6). Sejak surat itu dikirim, MPR maupun DPR belum menyampaikan sikap resmi. Hingga saat ini, pimpinan dua kamar legislatif itu irit bicara soal surat tersebut. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca secara langsung isi surat tersebut karena masih dalam masa reses. Hal yang sama juga disampaikan Ketua MPR, Ahmad Muzani. "Ya ini kan kebetulan reses, saya kan datang, Pak Sekjen-nya enggak ada. Saya mau lihat suratnya, suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca," kata Dasco di kompleks parlemen, Rabu (4/6) lalu. Usai sebulan masa reses, DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang III 2024-2025 pada Selasa (24/6) hari ini. Meski begitu, belum ada sinyal surat tersebut akan direspons resmi. Berdasarkan jadwal yang dirilis Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, rapat yang akan dimulai pukul 9.30 WIB itu akan diisi agenda tunggal yakni penyampaian pidato Ketua DPR, Puan Maharani. Rapat dipastikan tak akan menindaklanjuti atau membacakan surat usulan Forum Purnawirawan TNI. "Satu agenda pidato Bu Ketua membuka masa sidang," kata Indra saat dihubungi, Senin (23/6). Secara umum, surat pemakzulan itu berisi pernyataan bahwa Gibran telah melanggar hukum dan etika publik. Kemudian, atas dasar konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi, surat itu mengusulkan kepada MPR dan DPR memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Surat pemakzulan diklaim telah diteken 103 jenderal, 73 laksmana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sementara, empat jenderal yang menekan tanda tangan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Lalu, bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR? Secara umum, sebagian besar fraksi masih irit bicara soal usulan Forum Purnawirawan TNI. Namun, sikap tegas sempat dilontarkan Ketua Fraksi Golkar, Sarmuji. Dia menilai Gibran adalah wakil presiden yang terpilih secara konstitusional melalui Pilpres. Gibran bersama Prabowo, kata dia, bahkan dipilih oleh 58 persen masyarakat. Di sisi lain, kata dia, Gibran juga tak melakukan pelanggaran yang berpotensi pada pemakzulan. Oleh karena itu, Sarmuji meyakini upaya pemakzulan terhadap Gibran secara konstitusional mestinya tertutup. "Tidak melakukan pelanggaran yang bisa mendatangkan pemakzulan. Jadi sampai saat ini pintu pemakzulan secara konstitusional masih tertutup," katanya, Rabu (7/5) lalu. Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Komaruddin Watubun berharap agar surat Forum Purnawirawan direspons secara resmi, baik oleh DPR maupun MPR. Komar menilai, respons itu perlu dilakukan terlepas usulan itu diterima atau ditolak. Sikap resmi dari MPR maupun DPR berupa sikap dari setiap fraksi yang disampaikan lewat Paripurna. Jika semua fraksi menyetujui, usulan Forum Purnawirawan harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. "Supaya itu tidak berkepanjangan, maka harus ada jawaban resmi, informasi resmi, dari DPR dan MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat itu," kata Komar. CNNIndonesia.com telah menghubungi pimpinan fraksi-fraksi lain terkait sikap mereka terhadap usulan Forum Purnawirawan. Namun, hingga berita ini ditulis, para pimpinan fraksi mulai dari NasDem, Demokrat, PAN, hingga Gerindra belum merespons. (Ihr/dal) [Gambas: Video CNN] Politica News Desas-desus pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka di ruang publik. Usulan yang mencuat dari kalangan sipil dan segelintir elite politik, termasuk sejumlah purnawirawan TNI yang telah mengirimkan surat resmi ke DPR, DPD, dan MPR, kini menjadi sorotan tajam. Nasib Gibran pun berada di ujung tanduk, sepenuhnya bergantung pada keputusan parlemen. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dalam sebuah wawancara di program Dialog Rakyat Bersuara, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah purnawirawan TNI yang memilih jalur parlemen. "Saya pikir, saya salah satu yang mengusulkan, menyarankan purnawirawan pergi ke DPR daripada langsung ke Presiden, terkait kasus Gibran," ujar Feri. Gambar Istimewa : pict.sindonews.net Pertanyaan kunci pun muncul: apakah langkah purnawirawan TNI ini akan berdampak signifikan terhadap proses politik ke depan? Aiman Witjaksono, sang pemandu acara, mengungkapkan keraguan tersebut dalam wawancara yang sama. "Akan berpengaruh apa-apa ke depan?" tanyanya, mengindikasikan kerumitan dan ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Wakil Presiden muda tersebut. Kegaduhan ini tentu saja memicu spekulasi dan berbagai interpretasi. Langkah selanjutnya parlemen akan menentukan apakah usulan pemakzulan ini akan berlanjut ke tahap investigasi formal, atau hanya menjadi wacana politik yang sirna seiring berjalannya waktu. Publik pun dibuat menunggu dengan penuh tanda tanya, menanti keputusan krusial yang akan menentukan arah politik nasional. Perkembangan situasi ini akan terus dipantau dan dilaporkan oleh politicane.ws.id. Ikutikami : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Surat ini menyoroti proses politik dan hukum yang melibatkan Gibran, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial dan sarat nepotisme. Usulan ini menjadi sinyal kuat bahwa nasib politik Gibran kini berada di ujung tanduk dan siap diuji dalam arena politik yang lebih luas. Rocky Gerung, pengamat politik yang dikenal kritis, menyambut baik langkah ini sebagai bagian dari penegakan keadilan dan demokrasi. Menurutnya, persoalan yang dihadapi Gibran bukan sekadar soal individu, melainkan juga soal proses pencalonan yang dinilai melanggar aturan dan etika politik. Rocky menegaskan bahwa putusan MK yang meloloskan Gibran meski usianya belum memenuhi syarat adalah bentuk nepotisme yang bertentangan dengan semangat reformasi untuk memberantas KKN. Sementara itu, Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi, menilai usulan pemakzulan ini tidak memiliki substansi yang kuat. Namun, pandangan ini justru mempertegas bahwa isu ini akan terus menjadi perhatian publik dan menjadi ujian bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasinya. Dengan DPR yang telah menerima usulan ini, proses politik terhadap Gibran diprediksi akan semakin dinamis dan penuh tekanan. Publik pun menantikan langkah selanjutnya dari DPR, apakah akan menggelar rapat dengar pendapat atau bahkan memproses usulan ini lebih lanjut. Nasib Gibran kini tidak hanya bergantung pada kekuatan politiknya, tetapi juga pada mekanisme demokrasi dan tekanan publik yang terus mengawasi. (FG12)

Pathetic fallacy oxford english dictionary. Pathway oxford dictionary. Pathogen oxford dictionary. Pathetic meaning in oxford dictionary. Pathos oxford dictionary. Pathetic definition oxford dictionary. Pathology meaning oxford english dictionary. Path oxford dictionary. Pathetic oxford dictionary. Is pathological a word in oxford dictionary. Pathology dictionary oxford.